

PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK

Adysti Dwitantri (200812004)

ABSTRACT

This study examines how the Corporate Governance (CG) affects the tax management and contribute to the CG literature. The tax management measurement in this study is using the Effective Tax Rate (ETR). This objective of this study is to gain empirical evidence of the effect of corporate governance disclosure to the tax management. Samples used in this study are Indonesian finance companies registered in the Indonesian Stock Exchange during 2006-2010 period. This study uses purposive sampling method to get representative samples for the determined criteria.

This study focuses on the number of the board of commissioner, percentage of independent commissioner, and the compensation for the board of commissioner and directors as one of the company management characteristics. This study found a significant relation between the number of board of commissioner and the effective tax rate. The percentage of the independent commissioner's compensation has no significant influence to the effective tax rate, while the compensation for the board of commissioner and directors has a significant influence to the effective tax rate. Studying the CG mechanism not only can yield lower effective tax rate but also encourage managers to be more carefull in managing tax.

Keywords : *Corporate governance, board of commissioner, percentage of independent, compensation, effective tax rate, tax management.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Di Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak *Self-Assessment*. Wajib pajak menghitung, menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak pribadi atau badan diminta untuk aktif melaporkan semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan sarana SPT (Surat Pemberitahuan). Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini diharapkan wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang baik dan tertib dalam pembayaran pajak.

Berbagai upaya dilakukan wajib pajak badan (perusahaan) untuk mengefisienkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, salah satunya dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan manajemen pajak diharapkan perusahaan dapat meminimalkan pajak, sarana memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan beban pajak ditekan seminimal mungkin sehingga menghasilkan laba.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam perusahaan adalah *corporate governance*, (yang selanjutnya akan di tulis CG). Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar

berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penerapan CG di setiap negara dapat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap Negara dan juga faktor internal perusahaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Hal tersebut akan menambah nilai perusahaan, semakin meningkat nilai perusahaan maka perlu adanya upaya dalam mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh CG terhadap manajemen pajak. Salah satu penelitian yang membahas tentang hubungan tersebut dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Kompensasi memberikan insentif dalam jangka panjang bagi dewan direksi dan dewan komisaris untuk mengurangi pajak dalam jangka pendek dan panjang.

Dewan direksi dan dewan komisaris memainkan peranan penting dalam menentukan strategi manajemen perusahaan. Dewan direksi dengan mengutamakan *bottom-line performance* akan menginvestasikan sumber daya pada aktivitas yang memaksimalkan nilai perusahaan seperti perencanaan pajak yang akan menghasilkan pajak yang lebih rendah. Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Dalam penelitian ini penulis akan mengukur bagaimana GCG perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini penulis tidak memisahkan kompensasi direksi dan komisaris, karena adanya keterbatasan data. Pengungkapan yang disyaratkan di Indonesia adalah pengungkapan jumlah kompensasi secara keseluruhan dan tidak dipisahkan antara kompensasi direksi dan komisaris.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka diperlukan batasan masalah agar penelitian ini lebih fokus, yaitu :

1. Studi pada perusahaan dari sektor perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Studi atas data-data keuangan perusahaan sampel dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan data-data non-keuangan perusahaan sampel tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
3. Variabel *corporate governance* yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi.
4. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, *return on asset* dan *leverage*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Apakah variabel persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
3. Apakah variabel kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?
4. Apakah variabel *return on asset* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan?
5. Apakah variabel *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

6. Apakah variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, *return on asset* dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

1. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel *return on asset* terhadap manajemen pajak.
5. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel *leverage* terhadap manajemen pajak.
6. Menguji dan membuktikan pengaruh variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, *return on asset* dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen pajak.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Alijoyo (2004), *Agency Theory* menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (prinsipal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Upaya ini menimbulkan yang disebut *agency cost*, yang menurut teori harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya pelaksanaannya. *Agency cost* mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk '*bonding expenditures*' yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

2.2 Manajemen Pajak

Menurut Zain (2008), manajemen pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal. Posisi minimal yang dimaksud adalah posisi minimal sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandi (2011), manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan beberapa tujuan secara menyeluruh. Manajemen

keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan.

Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Dalam mencapai fungsi-fungsi manajemen pajak, ada beberapa cara yang dilakukan (1) perencanaan pajak (*tax planning*), (2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan (3) pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut Zain, perencanaan pajak didefinisikan sebagai tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintahan, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana yang tidak akan ditoleransi.

Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Pelaksanaan kewajiban perpajakan harus memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Langkah berikutnya adalah pengendalian pajak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah yang terutang.

2.3 Tarif Pajak Efektif

Dalam bidang perpajakan, dikenal istilah *statutory tax rate* (STR) atau tarif pajak statutori (TPS) dan *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif (TPE). Menurut Toder (2008), tarif pajak statutori adalah tarif yang dikenakan kepada pemasukan kena pajak perusahaan, yang setara dengan penerimaan dikurangi pemotongan untuk biaya tenaga kerja, material, dan penyusutan aset modal. Tarif pajak statutori di Indonesia mengacu pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan secara terus menerus menjadi objek reformasi pajak.

Sebaliknya, tarif pajak efektif (ETR) menilai pajak yang dibayarkan suatu perusahaan sebagai persentase dari keuntungan ekonomi perusahaan tersebut. Pendapatan kena pajak mempunyai nilai lebih rendah dari laba ekonomi ketika perusahaan dapat membebaskan sejumlah pendapatan dari pajak, menghapus biaya aset lebih cepat daripada laju penurunan aktual nilainya, atau mengklaim kredit pajak bagi pembelian tertentu. Ketika pendapatan kena pajak lebih rendah dari laba ekonomi, tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah daripada tarif pajak statutorinya.

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa tarif pajak efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan, kebijakan yang dilakukan perusahaan, profitabilitas perusahaan, sektor industri dan karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut dapat berupa kebijakan reformasi pajak, operasi di luar negeri, kebijakan remunerasi dan budaya perusahaan.

Tarif pajak efektif merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. Salah satu cara mencapai fungsi manajemen pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak. Dyreng et. al. (2007) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu pengukur *tax avoidance*. GAAP

ETR adalah tarif pajak efektif berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. GAAP ETR dihitung dengan menggunakan pembilang beban pajak penghasilan badan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Selain GAAP ETR, Minnick dan Noga (2010) menghitung *Cash ETR*. *Cash ETR* dapat mengukur *tax avoidance* dalam jangka pendek karena *Cash ETR* tidak dipengaruhi oleh estimasi. *Cash ETR* adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan secara kas. *Cash ETR* dihitung menggunakan pembilang jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bernad H (2011), dalam menghitung tarif pajak efektif digunakan *Current ETR*. Selanjutnya *Current ETR* akan dituliskan dengan CETR. CETR digunakan karena pajak yang disajikan dalam *cash flow* perusahaan tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan, melainkan ada unsur-unsur lainnya seperti cukai dan pajak-pajak lainnya. CETR bertujuan untuk melihat pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan.

2.4 Corporate Governance

Tata kelola perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara perusahaan dikelola, dipantau dan bertanggung jawab. Tidak ada define yang diterima secara universal mengenai tata kelola perusahaan. Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992.

Tjager at. al. (2003), menyimpulkan bahwa GCG pada intinya merupakan suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Menurut CeBISS (2001) - Lembaga *Independent Research & Publication for Business Development* – dalam Arafat (2008), GCG merupakan kelanjutan dari *agency theory* yang dalam tataran empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan perusahaan modern dimana terdapat ciri yang menonjol terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari pesaham sehingga dibutuhkanlah GCG.

Dalam penerapan GCG, ada dua faktor yang memegang peran dalam keberhasilan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti sistem hukum yang baik. Faktor internal yang mendukung keberhasilan penerapan GCG yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan *corporate governance* terhadap manajemen pajak, antara lain :

1. Desai dan Dharmapala (2004) menganalisis hubungan penghindaran pajak perusahaan dengan *high powered incentives* bagi manajer. Dalam penelitian ini, menyoroti tentang bagaimana peran efek umpan balik antara perlindungan pajak dan penyelewengan manajerial dalam menentukan bagaimana insentif yang tinggi mempengaruhi keputusan perlindungan pajak.

2. Minnick dan Noga (2010) dalam penelitiannya menyelidiki bagaimana tata kelola perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak jangka panjang. Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan signifikan untuk variabel *corporate governance* seperti, ukuran dewan, komisaris independen, *entrenchment* dan dualitas CEO dengan GAAP ETR. Namun, untuk komisari independen dan dualitas CEO memiliki hubungan yang signifikan dengan *Cash ETR*.
3. Budiman dan Setiyono (2011) menganalisis pengaruh dari karakter eksekutif dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada karakteristik eksekutif yang diukur dengan melihat seberapa besar risiko yang dihadapi, sehingga dapat menentukan apakah eksekutif bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Chasbiandani dan Martani (2011) menganalisis perilaku penghindaran pajak jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak jangka panjang dipengaruhi oleh penghindaran pajak jangka pendek, penghindaran pajak jangka pendek memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak jangka panjang.
5. Bernad H (2011) dalam penelitiannya menyelidiki bagaimana tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini berfokus pada komposisi dewan komisaris, persentase komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan direksi dengan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2009.
6. Irawan dan Farahmita (2012) menyelidiki bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi perilaku manajemen pajak dan memberikan kontribusi literatur tentang CG. Hasil penelitian menunjukkan bukti yang kuat atas hubungan mekanisme *corporate governance*, termasuk paket kompensasi direksi terhadap manajemen pajak perusahaan. Walaupun tidak semua hasil menunjukkan arah yang sesuai dengan hipotesis.
7. Wijayanti dan Mutmainah (2012) menggambarkan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, aktivitas (pertemuan) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional adalah pengaruh positif tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

2.6 Rerangka Pemikiran

Penelitian sebelumnya oleh Bernad H (2011) menunjukkan bahwa karakteristik *corporate governance* memainkan peranan penting dalam manajemen pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah dewan komisaris dalam penelitian tersebut menemukan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak, tetapi berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak maupun pajak yang dibayarkan. Hal ini menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen akan membuat manajemen berfokus pada *overall performance* yang dipengaruhi oleh beban pajak.

Kompensasi dewan komisaris dan direksi dalam penelitian tersebut juga memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak dan pajak yang dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisaris cenderung peduli pada performa perusahaan yang

diukur dengan laba akuntansi dan kepada arus kas keluar untuk membayar pajak penghasilan badan.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat apakah karakteristik *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak. Manajemen pajak dalam hal ini diukur dengan tarif pajak efektif berdasarkan beban pajak dan berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga dilakukan pengujian dua model.

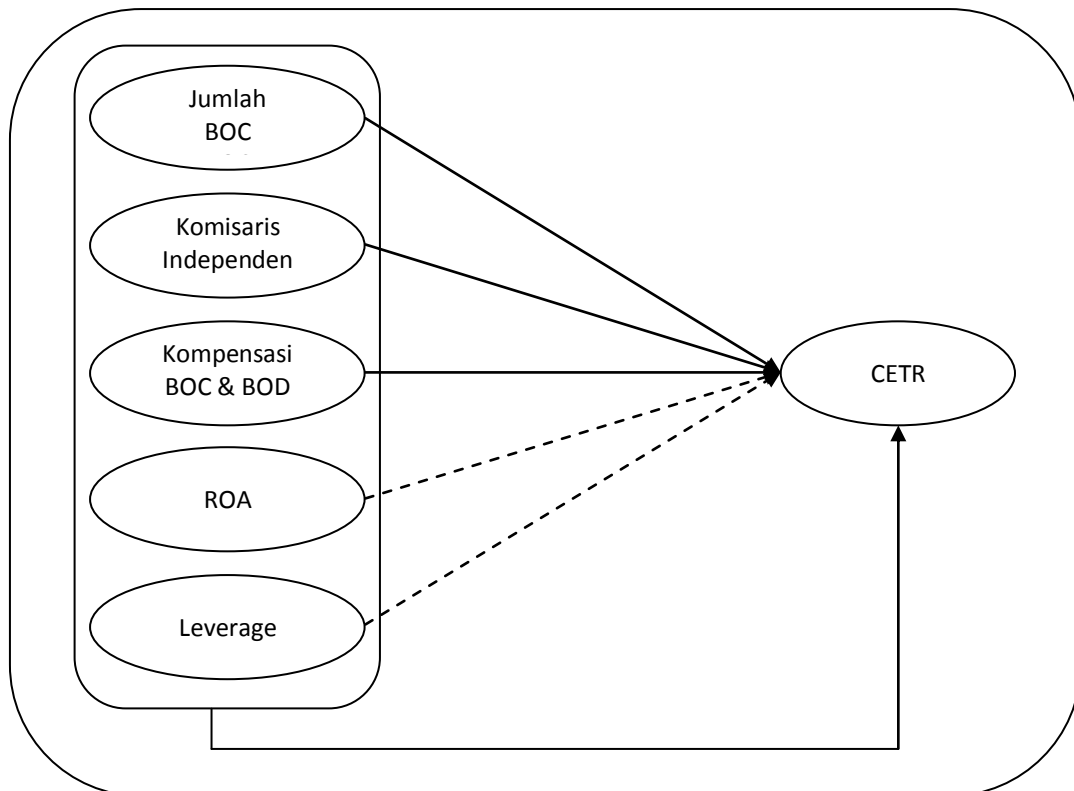
Dalam penelitian tersebut juga menggunakan variabel kontrol sebagai karakteristik perusahaan. variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan dan tingkat hutang.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bernad H (2011). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel yang digunakan dalam penelitian Bernad H (2011). Variabel *corporate governance* yang digunakan yaitu, jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen serta kompensasi dewan komisaris dan direksi. Sedangkan dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan hanya profitabilitas perusahaan (ROA) dan tingkat hutang (*leverage*).

Ukuran perusahaan tidak dimasukkan dalam penelitian ini agar dalam melakukan pengujian, model estimasi memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. Manajemen pajak dalam hal ini diukur dengan tarif pajak efektif berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga dilakukan pengujian satu model.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, berikut ini digambarkan rerangka pemikiran yang tersaji dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran



Sumber Olahan Data : Penulis

2.7 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1

H_{01} : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H_{a1} : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 2

H_{02} : Persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H_{a2} : Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 3

H_{03} : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

H_{a3} : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 4

H_{04} : *Return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

H_{a4} : *Return on asset* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Hipotesis 5

H_{05} : *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

H_{a5} : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang melakukan publikasi Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit dan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 2010. Perusahaan yang menjadi sampel juga harus memiliki data laporan GCG yang telah dipublikasikan untuk di analisa selama periode 2007 sampai dengan 2010.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan finansial atau bank-bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2007 sampai dengan 2010. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan finansial atau bank-bank yang terdaftar dan aktif pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2006 sampai dengan 31 Desember 2010.
3. Perusahaan sampel bank yang dipilih juga harus memiliki data keuangan untuk tahun 2006 sampai dengan 2010 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
4. Perusahaan sampel bank yang dipilih harus memiliki laporan GCG yang telah dipublikasikan untuk di analisa selama periode 2007 sampai dengan 2010.
5. Perusahaan sampel memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif.
6. Perusahaan sampel memiliki nilai CETR (tarif pajak efektif yang dibayarkan) yang positif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data sekunder digunakan beberapa metode agar penelitian jelas dan akurat yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.4 Pemilihan Model Estimasi

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu model dengan metode *common effect*, model *fixed effect* dan model *random effect*. Uji Chow dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003):

H_0 : Metode *common effect*

H_a : Metode *fixed effect*

Jika hasil yang didapatkan nilai Chow atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat keyakinan (α) tertentu maka H_0 di tolak.

Pengujian Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Metode *random effect*

H_a : Metode *fixed effect*

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *chi square*. Apabila *chi-square* hitung $>$ *chi-square* tabel dan *p-value* signifikan maka H_0 ditolak dan model *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas residual menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pengujian ini disyaratkan, apabila nilai Z diatas 0,05 maka H_0 tidak dapat ditolak, berarti data residual berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya jika nilai Z dibawah 0,05 maka H_0 dapat ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa data residual tidak terdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Data residual berdistribusi normal.

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat menggunakan beberapa cara, namun penelitian ini menggunakan analisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.80), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini mengaplikasikan uji *white*, metode ini dikenal juga dengan varian heteroskedastisitas terkoreksi (*heteroscedasticity-corrected variances*). Hasil yang diperhatikan dalam uji ini adalah nilai *F* dan *Obs*R-Squared*. Jika *p-value Obs*R-Squared* $<$ α , maka H_0 ditolak dan apabila *p-value Obs*R-Squared* $>$ α , maka H_0 diterima. Pengujian hipotesis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : ada heteroskedastisitas

4. Uji autokorelasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara uji *Breusch-Godfrey*. Nilai dari uji BG ini adalah *Lagrange-Multiplier* (Pengganda Lagrange). Nilai dalam mengindikasikan bahwa

data tersebut mengandung masalah autokorelasi atau tidak dengan melihat probabilitas. Bila probabilitas $> \alpha = 5\%$, berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya, bila probabilitas $\leq \alpha = 5\%$, berarti ada autokorelasi. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak terjadi autokorelasi pada residual

H_a : terjadi autokorelasi pada residual

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Alat bantu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Eviews 6*, *SPSS 17* dan *Microsoft Excel*. Dalam menganalisis data, penulis melakukan analisis deskriptif untuk menentukan batas maksimum dan minimum, pengujian asumsi dasar pada model regresi, pengujian R^2 dan pengujian hipotesis pada hasil regresi menggunakan t-statistik dan F-statistik.

1. Uji statistik t

Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan melalui:

- a. Berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel}
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (ada pengaruh signifikan)
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 tidak dapat ditolak (tidak berpengaruh signifikan)
- b. Berdasarkan signifikansi dengan kriteria
 - Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 tidak dapat diterima

2. Uji statistik F

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a .

Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan:

- a. Berdasarkan perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel}
 - Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (ada pengaruh signifikan)
 - Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 tidak dapat ditolak (tidak berpengaruh signifikan)
- b. Berdasarkan signifikansi dengan kriteria
 - Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima
 - Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 tidak dapat diterima

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil regresi pada tabel pada uji Chow menunjukkan adanya hasil R Square (R^2) yang merupakan koefisien determinasi yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 dan *adjusted* R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Dalam penelitian ini koefisien determinasi digambarkan dengan menggunakan hasil *adjusted* R^2 . Beberapa peneliti menganjurkan untuk menggunakan *adjusted* R^2 sehingga hasilnya tidak bias dan digunakan untuk variabel independen yang lebih dari dua.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 12 sampel Perbankan periode 2007 sampai dengan 2010.

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	0.05	0.67	0.3406	0.13243
BOARD	1	9	5.6875	2.06445
INDEP	33.33	100	58.6873	15.0229
COMP	21.65	26.09	24.3044	1.17499
ROA	-0.05	4.64	2.0356	1.15866
LEV	5.23	15.51	9.5938	2.25837

Sumber Olahan Data : SPSS 17.0

Peraturan Pencatatan Efek Nomor 1-A Huruf G.7 dalam Bernad H (2011) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, *good corporate governance* (GCG), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Melihat rata-rata jumlah komisaris independen adalah sebesar 58,68%, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan sampel sudah memenuhi peraturan tersebut.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mensyaratkan pula adanya komisaris bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Melihat jumlah minimal dewan komisaris dalam perusahaan sampel yaitu sebanyak dua orang, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel sepenuhnya mematuhi kedua peraturan yang telah disebutkan.

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai minimum CETR (tarif pajak efektif yang dibayarkan) sebesar 0.05 memiliki selisih yang jauh terhadap nilai maksimum CETR (tarif pajak efektif yang dibayarkan) sebesar 0.67. Hal ini memungkinkan bahwa tidak semua perusahaan melakukan menejemen pajak, terlihat dengan adanya tarif pajak efektif yang tinggi. Namun ada beberapa perusahaan melakukan manajemen pajak yang lebih efektif sehingga tarif pajak efektif yang dihasilkan kecil.

Tabel 4.2
Tren COMP, ROA dan LEV

Variabel	2007	2008	2009	2010
COMP	23.96	24.32	24.31	24.63
ROA	2.15	1.86	1.82	2.32
LEV	9.71	10.39	9.17	9.11

Sumber: Output Excel

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan pada variabel COMP dari tahun ke tahun, hanya saja pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan. Kenaikan pada variabel COMP dimungkinkan terjadi karena peningkatan pada laba akuntansi perusahaan, sehingga menguntungkan juga bagi komisaris dan direksi. Hal lain, mungkin

terjadi karena perusahaan melakukan manajemen pajak dengan baik sehingga beban pajak yang dibayarkan semakin rendah, sehingga laba setelah pajak penghasilan tinggi.

Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan dimungkinkan karena adanya kenaikan pada total aset namun tidak diikuti dengan adanya kenaikan *net income*. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan, kemungkinan karena ada kenaikan dari *net income* dan total aset, namun kenaikan pada *net income* lebih besar dari total aset. Kemungkinan lainnya mengindikasikan bahwa pada tahun 2010 operasi perusahaan semakin efisien sehingga kinerja dan profitabilitas semakin tinggi.

Pada tahun 2009 ke 2010 terjadi penurunan dimungkinkan karena pembiayaan perusahaan bergeser dari pembiayaan lewat penerbitan hutang menjadi pembiayaan lewat penerbitan saham. Implikasi lainnya adalah perusahaan tidak menerbitkan saham baru, tetapi perusahaan memakai keuntungan tahun-tahun sebelumnya atau tahun berjalan untuk melunasi hutang perusahaan sehingga rasio hutang terhadap modal semakin rendah.

4.2 Pemilihan Model estimasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow Test – CETR

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.129063	(11,21)	0.3884
Cross-section Chi-square	17.655666	11	0.0899

Sumber Olahan Data : Eviews 6

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari *Cross-section Chi-square* adalah sebesar 0,0899. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai *Chi Square* tersebut > 0,05 dan hasilnya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan hasil yang menunjukkan H_0 diterima maka model data panel adalah *common effect* atau *pool least square* (PLS) dan pengujian tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pengujian *hausman test*.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05560628
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.396

Asymp. Sig. (2-tailed)	.998
------------------------	------

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber Olahan Data : SPSS 17.0

Dari tabel 4.4 di atas, menghasilkan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,396 dan signifikan sebesar 0,998. Nilai signifikan dari uji tersebut menunjukkan bahwa hasil di atas lebih besar dari nilai $\alpha > 0,05$, artinya H_0 tidak dapat di tolak yang berarti bahwa *residual value* terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

	CETR	BOARD	INDEP	COMP	ROA	LEV
CETR	1.000000	0.203134	0.164461	-0.166335	0.028440	0.268302
BOARD	0.203134	1.000000	-0.443717	0.683191	0.211818	-0.349397
INDEP	0.164461	-0.443717	1.000000	-0.502236	-0.213421	0.576909
COMP	-0.166335	0.683191	-0.502236	1.000000	0.555628	-0.411016
ROA	0.028440	0.211818	-0.213421	0.555628	1.000000	-0.278780
LEV	0.268302	-0.349397	0.576909	-0.411016	-0.278780	1.000000

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa variabel independen COMP mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel BOARD dengan tingkat korelasi sebesar 0,683 atau sekitar 68,3%. Tetapi hasil korelasi tersebut tidak lebih dari 0,80 atau 80% dan dapat dikatakan bahwa hasil di atas tidak terjadi multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.494763	Prob. F(5,32)	0.2191
Obs*R-squared	7.194767	Prob. Chi-Square(5)	0.2066
Scaled explained SS	5.499878	Prob. Chi-Square(5)	0.3580

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Chi-square Obs*R-squared* sebesar 0,2066. Hasil di atas lebih besar dari nilai $\alpha > 0,05$, artinya H_0 diterima berarti bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : ada heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.711479	Prob. F(2,30)	0.1978
Obs*R-squared	3.891708	Prob. Chi-Square(2)	0.1429

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Dari tabel 4.7 di atas, diperoleh hasil probabilitas *Chi-square Obs*R-squared* sebesar 0,1429. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data tidak terjadi autokorelasi pada residual atau H_0 tidak dapat di tolak, karena nilai *Chi-square Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05.

H_0 : tidak terjadi autokorelasi pada residual

H_a : terjadi autokorelasi pada residual

4.4 Hasil Regresi Linear

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: CETR
Method: Least Squares
Date: 03/25/13 Time: 03:39
Sample: 1 48
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.155037	0.361420	3.195828	0.0031
BOARD	0.027604	0.007317	3.772588	0.0007
INDEP	0.000104	0.000986	0.105549	0.9166
COMP	-0.047918	0.015420	-3.107478	0.0039
ROA	0.022735	0.010542	2.156690	0.0386
LEV	0.011201	0.006170	1.815254	0.0789
R-squared	0.378846	Mean dependent var		0.303631
Adjusted R-squared	0.281791	S.D. dependent var		0.070775
S.E. of regression	0.059980	Akaike info criterion		-2.645677
Sum squared resid	0.115123	Schwarz criterion		-2.387111
Log likelihood	56.26786	Hannan-Quinn criter.		-2.553681
F-statistic	3.903401	Durbin-Watson stat		1.360669
Prob(F-statistic)	0.007102			

Sumber Data Olahan : Eviews 6

Tabel 4.8 di atas adalah tabel hasil uji regresi linear berganda. Dari tabel tersebut, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 1.1550 + 0.0276\text{BOARD} + 0.0001\text{INDEP} - 0.0479\text{COMP} + 0.0227\text{ROA} + 0.0112\text{LEV}$$

Atau persamaan regresi linear tanpa logaritman natural adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 1.1550 + 0.0276\text{BOARD} + 0.0001\text{INDEP} - 1.0490\text{COMP} + 0.0227\text{ROA} + 0.0112\text{LEV}$$

dimana CETR adalah tarif pajak efektif yang dibayarkan sebagai variabel terikat. Pada tabel *coefficients* persamaan tersebut memiliki konstanta sebesar 1,155, yang menjelaskan bahwa jika nilai BOARD, INDEP, COMP, ROA dan LEV adalah konstan, maka besarnya tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 1,1550 satuan. Pertama, nilai koefisien regresi BOARD adalah sebesar 0,0276, yang menjelaskan bahwa setiap penambahan BOARD sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0276 satuan. Kedua, nilai koefisien regresi INDEP adalah sebesar 0,0001 menjelaskan bahwa setiap penambahan INDEP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0001 satuan. Ketiga, nilai koefisien regresi COMP adalah sebesar -0,0479 atau -1,0490, yang menjelaskan bahwa setiap penambahan COMP sebesar 1 satuan maka akan menurunkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar Rp1,0490 dengan asumsi satuannya konstan. Keempat, nilai koefisien regresi ROA adalah sebesar 0,0227, yang menjelaskan bahwa setiap penambahan ROA sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0227. Variabel terakhir yaitu koefisien regresi LEV sebesar 0,0112, yang menjelaskan bahwa setiap penambahan LEV sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan sebesar 0,0112 satuan.

Tabel 4.8 di atas, menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,2817. Hal ini mengartikan bahwa hanya sebesar 28,17% variabel tarif pajak efektif yang dibayarkan dapat dijelaskan oleh BOARD, INDEP, COMP, ROA dan LEV pada persamaan di atas, sedangkan 71,83% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti karakteristik manajemen, keterampilan manajemen.

Berdasarkan tabel tersebut nilai F sebesar 3,9034 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0071 dibawah nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BOARD, INDEP, COMP, ROA dan LEV secara bersama-sama secara signifikan dapat mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan.

4.5 Uji Hipotesis

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel Independen	β	t (α)	F (α)	Hasil *
H ₁	BOARD	0.0276	0.0007	0.0071	Berpengaruh
H ₂	INDEP	0.0001	0.9166		Tidak berpengaruh
H ₃	COMP	-0.0479	0.0039		Berpengaruh
H ₄	ROA	0.0227	0.0386		Berpengaruh
H ₅	LEV	0.0112	0.0789		Tidak berpengaruh
H ₆	BOARD, INDEP, COMP, ROA, LEV			0.0071	Berpengaruh

(*) tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%

Sumber Data : Hasil Eviews 6 yang telah diolah

Tabel 4.9 merupakan hasil uji hipotesis untuk seluruh variabel model. Pertama, hipotesis 1 (H_1) pada tabel 4.9 menunjukkan probabilitas t sebesar 0.0007 untuk variabel BOARD, maka H_{01} ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel BOARD berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.

Hipotesis 2 (H_2) Variabel INDEP pada hipotesis 2 memiliki probabilitas t sebesar 0.9166. variabel INDEP juga memiliki probabilitas t di atas tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel INDEP tidak mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan. Maka H_{02} diterima.

Variabel COMP pada hipotesis 3 memiliki probabilitas t sebesar 0.0039. Probabilitas t dari variabel COMP tersebut berada di bawah nilai dari tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel COMP mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Oleh karena itu H_{03} ditolak.

Hipotesis 4 (H_4) pada tabel 4.9 menunjukkan probabilitas t sebesar 0.0386 yang berarti bahwa H_{04} ditolak. Hal ini membuktikan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.

Variabel LEV pada hipotesis 5 memiliki probabilitas t sebesar 0.0789, LEV juga memiliki probabilitas t di atas tingkat kepercayaan $\alpha = 0.05$. Hal ini juga membuktikan bahwa variabel LEV tidak mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan. Maka H_{06} diterima.

Untuk hipotesis 6 menggunakan nilai probabilitas F untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Dari hasil uji statistik F (α) yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 membuktikan bahwa variabel BOARD, INDEP, COMP, ROA, LEV secara simultan mempengaruhi tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0071. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_{07} ditolak.

4.6 Analisis hasil Penelitian

4.6.1 Jumlah Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil penelitian model, membuktikan bahwa variabel BOARD berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah yang positif. Hal ini membuktikan bahwa semakin bertambah jumlah dewan komisaris, maka tarif pajak efektif semakin tinggi, yang artinya perusahaan tidak melakukan manajemen pajak dengan efektif. Semakin bertambahnya dewan komisaris tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena dewan komisaris yang dipilih tidak memiliki pengetahuan dalam hal perpajakan, secara khusus manajemen pajak. Sehingga pemikiran-pemikiran yang diungkapkannya tidak akan mempengaruhi keputusan dalam perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Coles *et al.* (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris semakin banyak akan membuat performa perusahaan semakin tinggi. Coles *et al.* (2008) menyatakan bahwa hasil ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki ukuran besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan, akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

4.6.2 Persentase Komisaris Independen

Variabel INDEP merepresentasikan persentase komisaris independen dalam dewan komisaris. Berdasarkan hasil penelitian, persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah yang positif. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pengaruh jika semakin bertambahnya komisaris independen, maka akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Kemungkinan ini dapat terjadi karena bertambahnya komisaris independen pada perusahaan hanya dianggap sebagai

pemenuhan ketentuan formal, sehingga pengawasan yang dilakukan komisaris independen menjadi tidak efektif dan pemegang saham masih memiliki peranan penting. Hal tersebut dapat mengakibatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan meningkat karena pemegang saham bertindak untuk kepentingannya dalam meningkatkan kekayaannya tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Mutmainah (2012), mengemukakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena komisaris independen adalah orang yang berasal dari luar perusahaan, memungkinkan pengetahuan komisaris independen tentang keadaan perusahaan juga relatif terbatas. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya peran komisaris independen di dalam peningkatan kinerja perusahaan, karena mungkin dewan direksi tidak terlalu mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan oleh komisaris independen.

4.6.3 Kompensasi Komisaris dan Direksi

Hasil uji menemukan bahwa variabel kompensasi komisaris dan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan dengan arah hubungan yang negatif, artinya semakin kompensasi komisaris dan direksi meningkat maka akan menurunkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Meningkatnya kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi mempengaruhi mereka untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka miliki untuk perusahaan dan terlibat dalam manajemen pajak sehingga menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah.

Hasil dari penelitian ini sejalan Desai dan Dharmapala (2006) menganalisis hubungan penghindaran pajak perusahaan dengan *high powered incentives* bagi manajer. Kompensasi insentif adalah penentu signifikan aktivitas penghindaran pajak. Peningkatan kompensasi insentif akan menimbulkan efek yang positif lebih besar pada laba untuk perusahaan dengan tata kelola yang baik. Kompensasi insentif yang lebih tinggi bagi manajer akan melibatkan manajer dalam tingkat perlindungan pajak yang lebih tinggi.

4.6.4 Profitabilitas Perusahaan

Variabel ROA merepresentasikan profitabilitas perusahaan. Hasil uji menemukan bahwa variabel *return on asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Variabel *return on asset* menunjukkan hubungan yang positif dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan, artinya setiap adanya kenaikan pada profitabilitas akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. *Return on asset* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi aktivitas operasi perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan sehingga akan menimbulkan tarif pajak efektif yang lebih tinggi.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zhang (2003), penelitian tersebut menemukan bahwa ROA memiliki korelasi negatif dengan TPE. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan efisien akan mendapatkan *tax subsidiary* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah.

4.6.5 Tingkat Hutang Perusahaan

Hasil uji menemukan bahwa variabel *leverage* merepresentasikan kemampuan perusahaan mendanai aktivitasnya menggunakan hutang. Berdasarkan hasil regresi di atas, variabel *leverage* tidak ada pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan pengelolaan hutang dalam mendanai aktivitas perusahaannya sehingga tarif pajak efektif yang dibayarkan tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gupta dan Newberry (1997) menemukan adanya korelasi positif antara leverage dengan tarif pajak efektif. Fenomena ini terjadi karena perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi akan lebih menyukai penggunaan pembiayaan lewat penerbitan hutang.

4.7 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bagi perusahaan, yaitu dengan penerapan *corporate governance* diharapkan perusahaan dapat secara efektif melakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan semakin rendah. Semakin rendahnya tarif pajak efektif yang dibayarkan diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini, *corporate governance* diukur dengan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan direksi.

Dalam penelitian ini, semakin bertambahnya jumlah dewan komisaris berakibat meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hal ini diduga karena kurangnya pemahaman dan wawasan komisaris mengenai perpajakan. Dengan demikian perusahaan dapat melibatkan manajer untuk ikut berperan aktif dalam bertindak dan mengimplementasikan manajemen pajak, sehingga strategi atau tindakan yang dilakukan dapat menghasilkan tarif pajak efektif rendah.

Kompensasi dewan komisaris dan direksi juga terbukti dapat menurunkan tarif pajak efektif yang dibayarkan. Kebijakan dalam pemberian kompensasi diharapkan dapat mendorong kinerja dewan komisaris dan direksi untuk mengawasi dan memberikan strategi-strategi yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak dapat memberikan dampak kepada perusahaan, sehingga *cash flow* perusahaan tetap terjaga dan perusahaan secara aktif mengelola penghasilan kena pajak perusahaan agar rendah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pengaruh pengungkapan *corporate governance* terhadap manajemen pajak diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel jumlah dewan komisaris dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan menunjukkan arah yang positif. Hal ini terjadi diduga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dewan komisaris tentang manajemen perpajakan, sehingga pemikiran-pemikiran yang diungkapkannya kurang mempengaruhi keputusan dalam perpajakan.
2. Persentase komisaris independen dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel persentase komisaris independen dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan menunjukkan arah yang negatif. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan komisaris independen pada perusahaan hanya dianggap sebagai pemenuhan ketentuan formal, sehingga pengawasan yang dilakukan komisaris independen belum efektif termasuk dalam pengawasan manajemen pajak.
3. Jumlah kompensasi komisaris dan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Hubungan antara variabel jumlah kompensasi komisaris dan direksi dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan menunjukkan arah yang negatif. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan

direksi mempengaruhi mereka untuk memberikan kinerja terbaik yang mereka miliki untuk perusahaan dan terlibat dalam manajemen pajak sehingga menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah.

4. Variabel *return on asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. Variabel *return on asset* menunjukkan hubungan yang positif dengan tarif pajak efektif yang dibayarkan, artinya setiap adanya kenaikan pada profitabilitas akan meningkatkan tarif pajak efektif yang dibayarkan.
5. Variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan. *Leverage* merepresentasikan kemampuan perusahaan mendanai aktivitasnya menggunakan hutang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menggunakan pengelolaan hutang dalam mendanai aktivitas perusahaannya sehingga tarif pajak efektif yang dibayarkan tinggi.
6. Variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, *return on asset* dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti menemukan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya dalam kaitan penelitian ini.

1. Dalam mendukung penerapan manajemen pajak dalam perusahaan, sebaiknya perusahaan mengadakan seminar mengenai perpajakan, khususnya manajemen pajak bagi komisaris dan direksi sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang perpajakan atau manajemen pajak.
2. Mengadakan pelatihan atau seminar dalam rangka penguatan pemahaman level manajemen tentang perpajakan, khususnya manajemen pajak.
3. Adanya peran aktif Komite Remunerasi dalam merumuskan batasan atau ukuran tindakan yang dilakukan komisaris dan direksi serta level manajemen lainnya dalam mengurangi besaran tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan.
4. Penelitian ini hanya membahas kompensasi dewan komisaris dan direksi dalam bentuk gaji, bonus dan tunjangan atau fasilitas lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan paket kompensasi berbasis saham dan dapat memisahkan kompensasi menjadi dua, yaitu kompensasi komisaris dan kompensasi direksi.
5. Variabel yang digunakan hanya jumlah dewan komisaris, persentase kompensasi independen dan jumlah kompensasi komisaris dan direksi sebagai komponen *corporate governance*. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan variabel *corporate governance* yang lebih luas seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, *corporate social responsibility* atau menggunakan indeks *corporate governance*.
6. Penelitian ini juga hanya mengambil objek pada perusahaan perbankan dengan jumlah sampel yang sedikit. Untuk penelitian selanjutnya penggunaan sampel bisa diperluas dengan menggunakan sampel yang lebih heterogen, tidak hanya industri perbankan tetapi seluruh industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan perbandingan sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keadaan di Indonesia dan untuk melihat pengaruh yang lebih signifikan untuk industri lain diluar industri perbankan dengan jumlah sampel yang lebih banyak.
7. Penelitian ini hanya mengambil objek penelitian dalam jangka waktu yang pendek, selama periode 2007 sampai dengan 2010. Untuk penelitian selanjutnya penggunaan jangka waktu penelitian yang lebih panjang untuk melihat dampak dalam jangka yang lebih panjang pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dan Subartono Zaini. 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Arafat, Wilson. 2008. *How to Implement GCG Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher.
- Bernad, H. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Budiman, Judi dan Sutiyono. 2011. *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Pengindaran Pajak (Tax Avoidance)*. sna.akuntansi.unikal.ac.id.
- Chasbiandani, Tryas dan Dwi Martani. 2011. *Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan*. sna.akuntansi.unikal.ac.id
- Coles, J.L., Naveen, D, and Lalitha,N. 2008. *Boards: Does One Size Fit All?. Journal of Financial Economics*, 87: 329-356.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta. Ray Indonesia.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. 2004. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. Journal of Financial Economics*, 79: 145-179.
- Dyreng, S., M. Hanlon and Edward L. M. 2007. *Long-run Corporate Tax Avoidance. Accounting Review*, 83: 61-82.
- Fama, Eugene. F and Jensen Michael. C. 1983. *Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics*, Vol. XXVI.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanum, Dita Sakina. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Hsieh, Yao Chih. 2011. *New evidence on determinants of corporate effective tax rates. African Journal of Business Management*, Vol. 6, 1177-1180.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. *Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak*. sna.akuntansi.unikal.ac.id
- Janssen, Boudewijn and Willem Buijink. 2000. *Determinants of the Variability of Corporate Effective Tax Rates (ETRs): Evidence for the Netherlands*. MARC Working Paper MARC.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Minnick, Kristina and Tracy Noga. 2010. *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. Journal of Corporate Finance*, 16: 703-718.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PPBI/2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*.
- Richardson, G., & Lanis, R. 2007. *Determinant of the Variability of Corporate Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy*, 689-704.
- Suandy, Ery. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjager et. al. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Toder, Eric. 2008. *Business Taxation: What are the statutory and effective corporate tax rates?*. (Online), (<http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/key-elements/business/statutory.cfm> diakses 4 Desember 2012).
- Undang-undang No. 17 tahun 2000. *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.
- Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Ketempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang *Perseroan terbatas*.
- Wijayanti, Sri dan Siti Mutmainah. 2012. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009 – 2011*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol 2, No.2 (2012): 1-15.
- Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Zain. Mohammad. 2008. *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.